

## **ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN BELANJA MODAL PADA DIREKTORAT JENDRAL CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA**

*RECORDING AND REPORTING ANALYSIS OF CAPITAL EXPENDITURE IN THE  
DIRECTORATE GENERAL OF HUMAN SETTLEMENTS DEPARTMENT OF PUBLIC  
WORKS NORTH SULAWESI*

**Estephany Gloria Sitepu<sup>1</sup>, Herman Karamoy<sup>2</sup>, Heince Wokas<sup>3</sup>**

*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Sam Ratulangi, 95115 Manado, Indonesia  
Email: <sup>1</sup>estephany.sitepu62@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Tuntutan Akuntabilitas dalam sistem pemerintahan semakin ditanamkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal ini dibutuhkan adanya suatu tindakan aktivitas dan transaksi pemerintah yang baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan, sehingga bisa dilihat segala yang terjadi dan yang terdapat dalam ruang entitas pemerintahan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jendral Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan hanya membahas mengenai belanja modal. Tujuan dari Penelitian ini adalah bagaimanakah Direktorat Jendral Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan pencatatan dan pelaporan belanja modal dengan baik atau tidak (sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Menggunakan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat Jendral Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan terdapat penyajian akumulasi penyusutan dalam pelaporannya.

**Kata Kunci : Analisis, Pencatatan, Pelaporan, Belanja Modal**

### **ABSTRACT**

*Accountability demands increasingly implanted in the government system to achieve good governance. In this case there needs to be an act of activity and good government transactions with measures clear and can be summarized through the accounting process in the form of reports, which can be seen everything that happened and that is contained in the space of the government entity. This research was conducted in DGHS Public Works Department of North Sulawesi province and only discuss about capital spending. The purpose of this research is how DGHS Public Works Department of North Sulawesi in doing the recording and reporting of capital spending well or not ("PP no.71/ 2010 and Permendagri 64/2013"). The method used is descriptive method. Using secondary data sources. Results from this study indicate that the DGHS Public Works Department of North Sulawesi province has implemented financial management in accordance with PP no.71/2010 concerning Governmental Accounting Standards and Regulation no. 64 Year 2013 on Regional Financial Management and presentation of accumulated depreciation contained in its reporting.*

**Keywords : Analysis, Record, Report, Capital Expenditure**

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dibutuhkan adanya satu jaminan bahwa segala aktivitas dan transaksi pemerintah terekam secara baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan, sehingga bisa dilihat segala yang terjadi dan yang terdapat dalam ruang entitas pemerintahan tersebut.

Jika selama ini pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah lebih ditujukan kepada pemerintah dengan tingkat yang lebih tinggi (provinsi atau pusat), maka dengan diberlakukannya reformasi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran harus dilaporkan pemerintah daerah secara periode setiap semester mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa pada hakekatnya anggaran dikelola oleh pemerintah adalah milik masyarakat sudah semestinya ditujukan kepada pemiliknya (masyarakat) dan harus dibuat selengkap mungkin.

Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap daerah seperti tanah dan bangunan merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya serta dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat (Kolinug, 2015).

Direktorat Jendral Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum merupakan salah satu pusat biaya yang ada di pemerintahan daerah yang telah dianggarkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sebagai organisasi sektor publik yang bergerak dalam hal pembangunan, Ditjen Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara juga menerapkan mekanisme pencatatan dan pengelolaan keuangan yang termasuk didalamnya membahas tentang anggaran. Pengendalian laporan keuangan sangatlah penting dilakukan oleh setiap Dinas di Sulawesi Utara agar supaya setiap anggaran yang ditetapkan untuk membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Direktorat Jendral Cipta Karya dalam melakukan sistem dan prosedur, pengakuan, pencatatan dan pelaporan belanja modalnya.

### Tinjauan Pustaka

#### Konsep Akuntansi

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklarifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian dan hasilnya. Sedangkan menurut *Accounting Principle Board*, akuntansi adalah kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan.

### **Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP)**

Ruang lingkup SAPP adalah pemerintah pusat (dalam hal ini adalah lembaga tinggi Negara dan lembaga eksekutif) serta pemerintah daerah yang mendapat dana dari APBN (terkait dengan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan). Oleh karena itu, SAPP tidak dapat diterapkan untuk lingkungan pemerintah daerah (yang menggunakan APBD), lembaga keuangan Negara, serta BUMN/BUMD.

Dalam PP nomor 71 tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian sistem akuntansi pemerintah adalah sistem pencatatan yang dapat menghasilkan informasi keuangan untuk tujuan intern pemerintah bahkan untuk tujuan luar organisasi.

### **Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)**

Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) merupakan suatu instrumen penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual. SAPD sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi *double entry* melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo dan laporan keuangan itu sendiri.

### **Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya.

### **Akuntansi Aset Tetap**

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Kriteria belanja modal:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya dengan demikian menambah aset pemerintah.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

### **Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**

Barang milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara/Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelola barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/daerah, dalam

hal ini adalah Kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

## 2. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi deskriptif yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian (Kuncoro, 2009).

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Ditjen Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Manado dengan alamat jalan tikala area no. 80, Tikala Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2015.

### Prosedur Penelitian

1. Menentukan judul dan merumuskan masalah.
2. Mengumpulkan data sesuai permasalahan yang diangkat.
3. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait.
4. Mengelola data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran

### Metode Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara
2. Metode Dokumentasi
3. Media Elektronik dan Media Buku

### Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk menggunakan kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2011).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Direktorat Jendral Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara merupakan Satuan Kerja yang bergerak dalam bidang penataan lingkungan dan bangunan di Sulawesi Utara dalam hal ini Jalan, Irigasi, dan sarana prasarana lainnya.

Mekanisme Pencairan Dana Administrasi dan Belanja

Pembayaran dengan UP/TUP/GUP dan LS melalui tahapan proses sebagai berikut:

1. Proses pengajuan SPP
2. Proses pengajuan SPP dan Penerbitan SPM
3. Proses Penerbitan SP2D oleh KPPN
4. Proses Penyelesaian Tagihan.

## Pencatatan Belanja Modal

Pada Direktorat Jendral Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Utara pembiayaan untuk kegiatan Dinas disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta subsidi/ bantuan dari Pemerintah Pusat dan sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku demikian halnya untuk memperoleh aset tetap dalam belanja modal. Jadi segala sesuatu yang diperoleh dari anggaran Pemerintahan Pusat dan sumber-sumber lain yang sah merupakan Barang Milik Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa pencatatan aset tetap di lembar muka neraca adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Pencatatan Aset Tetap di Lembar Muka Neraca**

<b>Aset</b>	
Aset Tetap	
Tanah	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx
<b>Total Aset Tetap</b>	xxx

*Sumber: Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010*

**Tabel 2. Neraca Tingkat Satuan Kerja**

<b>NAMA PERKIRAAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1	2
ASET	
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	6,004,700,380
Gedung dan Bangunan	22,873,106,500
Jalan, Irigasi dan Jaringan	44,113,090,270
Aset Tetap Lainnya	773,249,000
Akumulasi Penyusutan	(17,989,945,483)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>55,774,200,667</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>55,774,200,667</b>

*Sumber: Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010*

## Pelaporan Belanja Modal

Pelaporan Belanja Modal Direktorat Jendral Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam pembahasannya terdapat dalam laporan realisasi anggaran yang telah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah no.71 Tahun 2010 dan Permendagri no. 64 Tahun 2013 dan dilaporkan sebagai laporan pertanggungjawaban pada bidang yang bertanggungjawab dalam Laporan Keuangan.

Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	REALISASI I ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5	6
	I BELANJA TRANSAKSI KAS	23,841,638,000	23,436,753,493	(404,902,507)	98,30
	Belanja Pegawai	206,520,000	189,410,000	(17,110,000)	91,72
	Belanja Barang	10,807,518,000	10,649,062,833	(158,455,167)	98,53
	Belanja Modal	12,027,600,000	11,798,262,660	(229,337,340)	98,09
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0
	Subsidi	0	0	0	0
	Hibah	0	0	0	0
	Bantuan Sosial	800,000,000	800,000,000	0	100
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0
	II BELANJA TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0
	Belanja Pegawai Non Kas	0	0	0	0
	Belanja Barang Non Kas	0	0	0	0
	Belanja Modal Non Kas	0	0	0	0
	Pembayaran Bunga Utang Non Kas	0	0	0	0
	Subsidi Non Kas	0	0	0	0
	Hibah Non Kas	0	0	0	0
	Bantuan Sosial Non Kas	0	0	0	0
	Belanja Lain-lain Non Kas	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA ( B I + B II )	23,841,638,000	23,436,735,493	(404,902,507)	98,03

Sumber: Laporan Keuangan Ditjen Cipta Karya SNVT Penataan Bangunan dan Lingkungan Sulut

Realisasi belanja tahun 2013 adalah sebesar Rp 23.436.735.493 atau sebesar 98,03%. Realisasi tersebut ditetapkan setelah Perda Perubahan APBD sebesar Rp 23.841.638. Didalamnya dapat dilihat Anggaran Belanja Modal adalah sebesar Rp 12,027,600,000 dan terealisasi sebesar Rp 11,798,262,660 atau sebesar 98,09 % maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran yang telah dipakai sudah mendekati pemakaian sepenuhnya untuk merealisasikan dalam belanja modal.

#### 4. PENUTUP

##### Kesimpulan

Pencatatan dan Pelaporan atas Belanja Modal pada Ditjen Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.

### Saran

Saran yang diberikan kepada Ditjen Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara, kiranya untuk tahun-tahun berikutnya, hendaknya Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Provinsi Utara berpedoman sepenuhnya kepada Peraturan Pemerintah yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, agar Pengelolaan Keuangan dapat berwujud dengan efektif dan efisien serta dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Paper dalam Jurnal*

- [1] Binh Pham Duc.(2014).”Tangible Fix Asset Accounting for Enterprise In Vietnam”.University of Hai Duong, Vietnam.Internatinal Journal of Economic and Finance ISSN 1916-971X <http://dx.doi.org/10.5539/ijef.v6n6p30> diakses pada 15 November 2015.
- [1] Danial Haryati.(2014).”Analisis Belanja Modal dan Penyajian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon”. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Jurnal EMBA Vol.2 No.2 Juni 2014, ISSN 2303-1174. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4422/3950> diakses pada 11 November 2015.Hal. 850-858
- [1] Ola Adisa abdulmarooph dan Ikheci Eugene. (2011).”*Applicatin of Depreciation Methods in Cost in Fix Assets in Selected Commercial Banks in Damaturu, Yobe State,Nigeria*”. *International Jurnal of Economic Development Reasearch and Investment Volume 2 Number 1*. diakses pada 15 November 2015.

### *Buku*

- [1] Hariadi Pramono, dkk. (2010).”Pengelolaan Keuangan Daerah”.Penerbit Salemba Empat.Jakarta.
- [1] Nordiawan Deddi dan Hertianti Ayuningtyas. (2010). “Akuntansi Sektor Publik Edisi 2”. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- [1] PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006.
- [1] PERMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2013.
- [1] PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang,”Standard Akuntansi Pemerintahan”.
- [1] PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang “Pengelolaan Uang Negara/Daerah”
- [1] PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang “Pengelolaan Barang Milik Negara”
- [1] Ratmono Dwi dan Sholihin Mahfud.2015. “Akuntansi Keuangan Daerah berbasis akrual”. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- [1] Sujarweni V. Wiratna,”Akuntansi Sektor Publik” Penerbit Pustaka Baru Press Yogyakarta, (2015)
- [1] Tanjung Hafiz Abdul. (2013) .”Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual”.Penerbit Alfabeta.Bandung.
- [1] Tanjung Hafiz Abdul.(2010).”Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD Buku 1 Edisi 2”. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

### *Skripsi*

- [1] Gahung Yesi. (2012).”Analisis Pengakuan dan Pelaporan Atas Belanja Langsung Pada Kabupaten Minahasa Utara”.Universitas Sam Ratulangi. Manado (Skripsi Tidak dipublikasikan).

- [1] Syefira Anisaa. (2013) .”Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal Pada Dinas Perhubungan Kota Manado ”Universitas Sam Ratulangi Manado, (Skripsi tidak dipublikasikan)
- [1] Tanjung Hafiz Abdul.(2011).”Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD dan Pemerintah Daerah Buku 2”.Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- [1] Teguh Widodo.(2014).”Pengelolaan Keuangan Daerah ”Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.Jakarta.